

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien di dalam Rencana Strategis (Renstra). Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dihasilkan dari posisi strategis hasil analisa lingkungan *kekuatan dan peluang* yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Berdasarkan analisa terhadap faktor-faktor yang saling berpengaruh dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023-2026, maka dirumuskan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel V.1.  
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan  
 Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

<b>VISI</b>	:	<b>TERWUJUDNYA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEBAGAI WILAYAH AGRI-BAHARI YANG MAJU BERWAWASAN LINGKUNGAN, DIDUKUNG OLEH SUMBER DAYA MANUSIA HANDAL DAN PEMERINTAH YANG AMANAH MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA</b>		
<b>MISI I</b>	:	<b>Memperkuat Implementasi Reformasi Birokrasi di Daerah</b>		
<b>Tujuan Renstra</b>	:	<b>Sasaran Renstra</b>	<b>Strategi Renstra</b>	<b>Arah Kebijakan Renstra</b>
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	:	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tercapainya Penilaian SAKIP Perangkat Daerah
				Meningkatkan Pelayanan Keuangan PD DLHK
				Melaksanakan administrasi umum perangkat daerah
				Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Melaksanakan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

<b>VISI</b>	:	<b>TERWUJUDNYA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEBAGAI WILAYAH AGRI-BAHARI YANG MAJU BERWAWASAN LINGKUNGAN, DIDUKUNG OLEH SUMBER DAYA MANUSIA HANDAL DAN PEMERINTAH YANG AMANAH MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA</b>		
<b>MISI VI</b>	:	<b>Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan</b>		
<b>Tujuan Renstra</b>	:	<b>Sasaran Renstra</b>	<b>Strategi Renstra</b>	<b>Arah Kebijakan Renstra</b>
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	:	1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Penyusunan perencanaan lingkungan hidup	Peningkatan kualitas perencanaan lingkungan hidup
			2. Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.1 Peningkatan Titik Sampling Uji Kualitas Lingkungan Hidup
			3. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2.2 Menurunkan Emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan
				Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

<b>VISI</b>	:	<b>TERWUJUDNYA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEBAGAI WILAYAH AGRI-BAHARI YANG MAJU BERWAWASAN LINGKUNGAN, DIDUKUNG OLEH SUMBER DAYA MANUSIA HANDAL DAN PEMERINTAH YANG AMANAH MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA</b>					
<b>MISI VI</b>	:	<b>Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan</b>					
<b>Tujuan Renstra</b>	:	<b>Sasaran Renstra</b>	<b>Strategi Renstra</b>	<b>Arah Kebijakan Renstra</b>			
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	4. Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatkan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)			
			5. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Peningkatan Kepatuhan Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			
			6. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisonal	Peningkatan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisonal			
			7. Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup			
			8. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Peningkatan Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan kepada Masyarakat			
			9. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			
			10. Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan			
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		2. Peningkatan Tata Kelola Kehutanan	1. Peningkatan luas Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Meningkatkan Luas Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi
						2. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan melalui Perlindungan Hutan dan Kawasan Hutan	Peningkatan Perlindungan Hutan dan Kawasan Hutan
						3. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan melalui Rehabilitasi di Luar	Peningkatan Luas Rehabilitasi di Lahan Kritis

<b>VISI</b>	:	TERWUJUDNYA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEBAGAI WILAYAH AGRI-BAHARI YANG MAJU BERWAWASAN LINGKUNGAN, DIDUKUNG OLEH SUMBER DAYA MANUSIA HANDAL DAN PEMERINTAH YANG AMANAH MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA		
<b>MISI VI</b>	:	Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan		
<b>Tujuan Renstra</b>	:	<b>Sasaran Renstra</b>	<b>Strategi Renstra</b>	<b>Arah Kebijakan Renstra</b>
			Kawasan Hutan Negara	
			4. Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Peningkatan Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
			5. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
			6. Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Peningkatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai